



Pembuatan Kebijakan dan Perencanaan Pendidikan Pada Sekolah SMKN 1 Percut Sei Tuan

Muhammad Al-Fatih, Amiruddin

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Abstract

Received: 22 desember 2024

Revised: 29 Desember 2024

Accepted: 18 Januari 2025

Education policy is a set of rules as a form of government support in an effort to build an education system in accordance with the goals and ideals desired together. This support concerns the context of politics, budget, empowerment, rules, and so on. The policy is a strategic step in education that is outlined from the vision and mission of education in order to realize the achievement of educational goals in a society for a certain period of time. This study aims to describe the making of education policies and planning at SMKN 1 Percut Sei Tuan. While education planning is a series of processes that are prepared to face the future so that educational goals can be realized effectively and efficiently. The purpose of this study uses a qualitative case study method approach which is used to obtain information on how education policies and planning are made at SMKN 1 Percut Sei Tuan.

Keywords: Policy, Planning, Education

(*) Corresponding Author:

muhammad332244016@uinsu.ac.id

How to Cite: Fatih, M., & Amiruddin, A. (2025). Pembuatan Kebijakan dan Perencanaan Pendidikan Pada Sekolah SMKN 1 Percut Sei Tuan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(1), 25-32. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/11295>

PENDAHULUAN

Kebijakan pendidikan tidak bisa lepas dari hakikat pendidikan, yaitu usaha untuk memanusiakan anak manusia dan menyiapkannya menjadi generasi penerus yang cerdas lagi pancasilais serta beriman kepada Tuhan yang Maha Esa sebagaimana yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945 alenia keempat. Tahapan dalam pembuatan suatu kebijakan pendidikan dimulai dengan tahap perencanaan atau agenda kebijakan (Formulasi kebijakan) atau latar belakang suatu kebijakan dibuat, selanjutnya dilanjutkan pada tahap pengesahan, lalu pada tahap pelaksanaan atau implementasi serta diakhiri dengan tahap penilaian dan evaluasi.

Perencanaan dalam dunia pendidikan tentu sangat penting untuk dilakukan untuk mempersiapkan bagaimana sebuah proses pembelajaran yang nantinya akan digunakan dapat sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada di kelas. Perencanaan dalam arti yang sederhana dapat disimpulkan sebagai suatu proses untuk mempersiapkan hal-hal yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Maka perencanaan pendidikan adalah suatu proses yang dilakukan oleh tenaga kependidikan dan tenaga pendidik dalam rangka mempersiapkan hal-hal yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan terlebih dahulu.



Perencanaan dibuat untuk mempertegas garis untuk menuju tercapainya sebuah tujuan dalam pendidikan. Perencanaan ini sendiri dilakukan oleh berbagai elemen di bidang pendidikan, mulai dari pemerintah khususnya menteri pendidikan dan kebudayaan, kemudian pemerintah di setiap daerah, lembaga kependidikan, kepala sekolah, staf guru, staf karyawan sampai pada siswa itu sendiri. Menentukan kebijakan, prioritas, kebutuhan, biaya dalam proses pendidikan tentu dibutuhkan analisis yang rasional dan sistematis agar dapat memaksimalkan efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan tersebut. Maka, tidak dapat dipungkiri jika perencanaan pendidikan ini sangat penting dan merupakan dasar dari sebuah proses di bidang pendidikan yang mana selalu berkaitan dengan pembuatan kebijakan pada sekolah suatu instansi itu pula.

KAJIAN TEORI

Kebijakan Pendidikan

Secara etimologi, istilah kebijakan berasal dari kata “bijak” yang berarti “selalu menggunakan akal budidaya; pandai; mahir .Selanjutnya dengan memberi imbuhan ke- dan -an, maka kata kebijakan berarti “rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan. Bertitik tolak dari pengertian di atas, maka pengertian kebijakan dalam pendidikan merupakan keseluruhan proses dan hasil perumusan langkah-langkah strategis pendidikan, yang dijabarkan dari visi, misi pendidikan, dalam rangka untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat untuk suatu kurun waktu tertentu. Begitu pula halnya kebijakan dalam pendidikan Islam, harus pula relevan dengan visi, misi pendidikan Islam.

Kebijakan pendidikan merupakan hasil akhir dari sebuah keputusan di bidang pendidikan yang diambil dengan memperhatikan komponen-komponen pendidikan dan komponen sosial yang berkaitan. Kebijakan pendidikan yang dilahirkan harus bersifat interdisipliner dan kontekstual. Untuk dapat melahirkan kebijakan pendidikan maka diperlukan analisis kebijakan pendidikan yang tepat. Analisis kebijakan pendidikan merupakan cara untuk memecahkan permasalahan yang berhubungan dengan pendidikan melalui penerapan ilmu sosial terapan dengan menggunakan metode inkuiri dan argumen ganda.

Kebijakan pendidikan adalah seperangkat aturan sebagai bentuk keberpihakan dari pemerintah dalam upaya membangun satu sistem pendidikan sesuai dengan tujuan dan cita-cita yang diinginkan bersama. Keberpihakan tersebut menyangkut dalam konteks politik, anggaran, pemberdayaan, tata aturan, dan sebagainya. Kebijakan langkah strategi pendidikan yang dijabarkan dari visi dan misi pendidikan dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat untuk suatu kurun waktu tertentu.

Pembuatan kebijakan tidak terlepas dari hal yang bersifat politis dikarenakan dalam pembuatan kebijakan akan terjadi proses pertentangan antar kelompok yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda. Maka dalam pengembangan kebijakan pendidikan tersebut harus mampu mengalahkan ego pribadi dan kelompok sehingga pertentangan yang terjadi bersifat netral dan objektif. Oleh sebab itu para pembuat kebijakan pendidikan harus mampu memahami kerangka kerja pengembangan kebijakan pendidikan, proses analisis

kebijakan pendidikan, dan strategi implementasi kebijakan pendidikan agar terciptanya kebijakan pendidikan yang tepat sasaran.

Model Pembuatan Kebijakan pendidikan

Ada beberapa model perumusan kebijakan pendidikan yaitu:

a. Model kelembagaan

Model kelembagaan ini berprinsip bahwa pemerintah adalah penanggung jawab pembuatan kebijakan. Apapun yang dihasilkan oleh pemerintah merupakan kebijakan publik. Model kelembagaan ini didasari oleh fungsi kelembagaan dari setiap sektor pemerintah dalam merumuskan kebijakan. Maka oleh sebab itu model kelembagaan ini dapat diterapkan dalam merumuskan kebijakan pendidikan di sektor pemerintah.

b. Model sistem

Model sistem ini disebut juga dengan model deskriptif. Dalam merumuskan kebijakan dengan model ini pembuat kebijakan dilihat perannya dari proses perancangan maupun pengkoordinasian dalam menemukan pemecahan masalah yang akan 1) memformulasikan kesempatan dan menggunakan bantuan dari aspek internal maupun aspek eksternal, 2) memberikan kepuasan sesuai dengan permintaan lingkungan, dan 3) dapat memberikan kepuasan terhadap pembuat kebijakan.

c. Model penyelidikan campuran

Model penyelidikan campuran disebut juga dengan model mixed scanning yang menggunakan aspek-aspek dari dua pendekatan maupun dua sudut pandang. Model penyelidikan campuran menuntut pembuat kebijakan untuk menggunakan teori rasional yang bersifat menyeluruh dan inkrementalisme dengan memperhatikan situasi dan kondisi yang berbeda.

d. Model proses

Adapun tahapan perumusan kebijakan dengan model proses yaitu mengidentifikasi masalah, menyusun agenda, merumuskan perancangan kebijakan, pengesahan kebijakan, penerapan kebijakan, dan penilaian kebijakan.

e. Model teori elite

Teori elite ini berpadangan bahwa demokrasi yang dijalankan secara penuh akan memungkinkan adanya bias dalam merumuskan kebijakan. Hal ini dikarenakan kebijakan yang dihasilkan merupakan bagian dari preferensi politik kaum elite. Model ini lebih banyak mempertimbangkan kepentingan elit dibandingkan tuntutan dari masyarakat.

f. Model rasional

Model rasional merupakan kebijakan yang didapatkan dari perolehan sosial maksimum. Artinya bahwa model rasional yang digunakan oleh pemerintah harus mampu untuk menghasilkan kebermanfaatan yang maksimal bagi masyarakat. Teori ini mempreskripsikan berbagai bentuk prosedur dalam mengambil keputusan yang diperoleh dari cara yang dianggap efisien dalam merumuskan kebijakan.

g. Model inkrementalis

Model ini beranggapan bahwa pembuat kebijakan tidak memungkinkan melaksanakan proses seperti model rasional dikarenakan adanya keterbatasan pada pembuat kebijakan seperti keterbatasan waktu, intelektual dan biaya. Model

ini melakukan penyesuaian dengan realitas kehidupan demokratis dan pluralitas serta keterbatasan yang dimiliki manusia. Model ini berlandaskan bahwa adanya perubahan inkrementalis mengakibatkan adanya proses keamanan apabila terjadinya perubahan kebijakan.

Proses Analisis Pembuatan Kebijakan Pendidikan

Dalam proses analisis kebijakan terdapat proses yang harus dilaksanakan oleh pembuat kebijakan. Proses ini bertujuan agar kebijakan yang dilahirkan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Adapun proses analisis kebijakan tersebut yaitu:

a. Inisiasi

Tahap inisiasi diawali ketika adanya masalah yang bersifat potensial. Permasalahan potensial tersebut dirasakan ketika adanya upaya untuk mengurangi permasalahan yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan tersebut secara tepat. Pada fase ini belum dituntut untuk dapat merumuskan permasalahan namun diperlukan sebuah pemikiran lebih lanjut apakah permasalahan ini diperlukan untuk dirumuskan. Selain itu juga diperlukan pengumpulan informasi yang berkaitan dengan kebijakan secara umum dan memprediksi pilihan-pilihan kebijakan yang dirasa dapat untuk dikembangkan.

b. Estimasi

Pada tahapan estimasi ini diperlukan pemikiran yang berhubungan dengan dampak, pembiayaan dan kelebihan dari alternatif yang disajikan. Pada tahapan ini masalah difokuskan dengan menggunakan metode olian yang bersifat proyektif dan empirik agar dapat diketahuinya dampak yang ditimbulkan dari kebijakan yang dipilih.

c. Seleksi

Tahapan seleksi ini berkaitan dengan keputusan. Setelah dilakukan analisis kebijakan berupa perumusan dan penilaian kebijakan maka diperlukanlah pemilihan kebijakan.

d. Implementasi

Tahapan implementasi merupakan tahapan melaksanakan pilihan yang telah disepakati. Tahapan implementasi merupakan saran untuk melakukan uji kelayakan pilihan yang dipilih secara nyata.

e. Evaluasi

Pada tahapan ini berusaha untuk menemukan jawaban mengenai sejauh mana kebijakan yang dipilih berhasil. Pada tahapan ini dilakukan pengukuran dengan indikator yang telah dilakukan.

f. Terminasi

Tahapan terminasi adalah tahapan yang menyesuaikan kebijakan yang tidak diperlukan dengan keadaan.

Perencanaan Pendidikan

Menurut Yusuf Enoch, perencanaan pendidikan adalah suatu proses yang mempersiapkan alternatif keputusan bagi kegiatan masa depan yang diarahkan untuk pencapaian tujuan dengan usaha yang optimal. Kemudian Menurut Guruge, perencanaan pendidikan adalah proses mempersiapkan kegiatan di masa depan dalam bidang pembangunan pendidikan.

Dengan memperhatikan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa perencanaan pendidikan adalah suatu rangkaian proses yang dipersiapkan untuk menghadapi masa depan agar tujuan pendidikan dapat terwujud secara efektif dan efisien.

Proses Perencanaan Pendidikan

Secara spesifik Bintoro Tjokroaminodjojo mengemukakan tahap-tahap proses perencanaan, termasuk dalam perencanaan pendidikan dalam pembangunan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Penyusunan rencana
 - a. Tinjauan keadaan.
 - b. Perkiraan keadaan masa yang akan dilalui rencana (forecasting).
 - c. Tujuan rencana (plan objectives) dan pemilihan cara-cara pencapaian tujuan rencana tersebut.
 - d. Identifikasi kebijaksanaan dan/atau kegiatan usaha yang perlu dilakukan dalam rencana.
 - e. Persetujuan rencana.

- 2) Penyusunan program rencana

Dalam tahap ini, dilakukan perumusan yang lebih terperinci mengenai tujuan atau sasaran dalam jangka waktu tertentu, suatu perincian jadwal kegiatan, jumlah pembiayaan. Pengesahan rencana juga diperlukan agar mempunyai kedudukan legal untuk pelaksanaannya.

- 3) Pelaksanaan rencana

Dalam perencanaan, perlu dipertimbangkan kegiatan-kegiatan pemeliharaan. Kebijaksanaan pun perlu diikuti implikasi pelaksanaannya, bahkan secara terus menerus memerlukan penyesuaian.

- 4) Melakukan pengawasan atas pelaksanaan rencana.

- 5) Dalam proses perencanaan perlu dilakukan pula evaluasi.

Evaluasi ini membantu kegiatan pengawasan, dalam hal ini dilakukan suatu evaluasi atau suatu tinjau yang berjalan secara terus menerus. Dari hasil evaluasi ini dapat dilakukan perbaikan terhadap perencanaan selanjutnya atau sesuai yang diperlukan dalam pelaksanaan perencanaan.

METODE

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah Penelitian kualitatif melalui pengumpulan data melalui wawancara dengan narasumber sebagai instrumen kunci. Prosedur analisis data yang dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan merupakan salah satu teknik data kualitatif. penelitian ini bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis melalui proses dan makna dan lebih ditonjolkan dalam penelitian ini. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian ini sesuai dengan fakta lapangan.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara langsung terhadap narasumber yang bersangkutan. Wawancara adalah pertemuan dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam topik tertentu. Teknik ini digunakan untuk

mendapatkan data tentang Pembuatan Kebijakan dan Perencanaan Pendidikan Pada Sekolah SMKN 1 Percut Sei Tuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas, terkait pembuatan kebijakan dan perencanaan pendidikan di SMK Negeri 1 Percut Sei Tuan, Bahwa sekolah SMA dan SMK sejatinya adalah 2 jenjang pendidikan yang sama dengan tujuan berbeda. Dimana di SMA siswa dituntut untuk melanjutkan ke jenjang universitas (kuliah), sedangkan di SMK lulusannya ditempah untuk bisa bekerja atau mencari kerja, atau menciptakan lapangan kerja. Di SMK Negeri 1 Percut Sei Tuan, bapak kepala sekolah yaitu bapak Kasni, M.Pd. mengemukakan bahwa pelaksanaan pembelajaran di SMK Negeri 1 Percut Sei Tuan berbeda dengan pembelajaran di sekolah umum. Di SMA, disana lebih menekankan pelajaran-pelajaran yang umum, seperti fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa indonesia dan lain sebagainya. Sedangkan pada sekolah SMK, pelajaran umum juga dipelajari, tetapi ada sebagian mata pelajaran yang dihapuskan, seperti fisika dan kimia, dimana itu dilebur (di ubah nama) menjadi Projek ilmu pengetahuan alam dan sosial.

Selanjutnya terkait Pembuatan kebijakan, biasanya kebijakan – kebijakan yang diterapkan di SMK Negeri 1 Percut Sei Tuan adalah kebijakan yang berasal dari pemerintah, keputusan bersama, dengan melihat situasi dan kondisi yang dibutuhkan oleh warga sekolah pada saat itu. Pembuatan kebijakan oleh guru atau lebih dikenal dengan musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) biasanya dilakukan sekali sebulan (1 kali/bulan), dengan menyesuaikan jurusan para siswa di SMK Negeri 1 Percut Sei Tuan.

Sekolah SMK biasanya memiliki hubungan atau koneksi dengan industry-industri seperti Industri Toyota, Yamaha, PT, dan lain sebagainya. Dimana nantinya dari industri-industri tersebut akan didatangkan guru tamu, untuk memperdalam skill atau keahlian dari para siswa/i. Sedangkan Perencanaan dalam mata pelajaran seluruh jurusan ditetapkan secara bersama, dengan ada ketua dan sekretaris, dimana ini akan menjadi pengarah atau pengkoordinir suatu kegiatan musyawarah agar nantinya muncul hasil kesepakatan bersama sesuai dengan kebutuhan warga sekolah pada saat itu.

Pada sekolah SMK, lebih condong kepada teknik atau khusus minat (keahlian) dari siswanya sesuai jurusan masing”. Pada SMK NEGERI 1 Percut Sei Tuan mata pelajaran umum sebagian terbatas hanya pada tingkatan kelasnya saja, seperti pelajaran Projek ilmu pengetahuan alam dan sosial, olahraga, dimana pelajaran tersebut hanya dipelajari di kelas X saja, sedangkan pada kelas XI dan XII sudah tidak belajar lagi. Tapi ada juga mata pelajaran yang terus dipelajari dari kelas x, xi, xii karena dinilai sangat penting untuk para siswa ketika memasuki dunia kerja nantinya, yaitu pelajaran bahasa indonesia, matematika, seperti melamar kerja, interview.

Para guru melakukan musyawarah per MGMP untuk melakukan kebijakan 1 kali sebulan, dengan menyesuaikan jurusan para siswa di SMK tersebut. Selanjutnya sekolah SMK memiliki hubungan perlibatan dengan industri khususnya SMK Negeri 1 Percut Sei Tuan, contohnya jurusan Otomotif, mereka

memiliki koneksi dengan TOYOTA. Sedangkan jurusan teknik sepeda motor kordinasinya dengan kelas YAMAHA, begitu juga jurusan jurusan yang lainnya. Dimana ada guru tamu untuk persetiap jurusan tsb.

Sebagian anak anak yang telah lulus, mereka kebanyakan ada yang bekerja di industri industri tersebut seperti Toyota,yamaha,dll. Perencanaan dalam mata pelajaran seluruh jurusan ditetapkan secara bersama, dengan ada ketua dan sekretaris,dimana ketua MGMP di SMK 1 ini adalah ibu Dewi dimana hasilnya nanti sesuai dengan kondisi seperti keputusan pemerintah, kebutuhan siswa,dsb. Seperti pada masa covid-19, di SMK 1 Negeri Percut Sei Tuan, pembelajaran dilakukan secara online, dan pada saat pelajaran praktik siswa di buat sesi masuknya. Karena pada sekolah SMK harus lebih menekankan penanaman skill untuk siswa, karena mereka diajar untuk bisa bekerja setelah lulus, bukan untuk kuliah.

KESIMPULAN

Kebijakan pendidikan merupakan hasil akhir dari sebuah keputusan dibidang pendidikan yang diambil dengan memperhatikan komponen-komponen pendidikan dan komponen sosial yang berkaitan. Kebijakan pendidikan yang dilahirkan harus bersifat intredisipliner dan kontekstual. Untuk dapat melahirkan kebijakan pendidikan maka diperlukan analisis kebijakan pendidikan yang tepat. Analisis kebijakan pendidikan merupakan cara untuk memecahkan permasalahan yang berhubungan dengan pendidikan melalui pendeiatan ilmu sosial terapan dengan menggunakan metode inguiri dan argumen ganda.

Pembuatan kebijakan oleh guru atau lebih dikenal dengan musyawah guru mata pelajaran (MGMP) biasanya dilakukan sekali sebulan (1 kali/bulan),dengan menyesuaikan jurusan para siswa di SMK Negeri 1 Percut Sei Tuan. Sekolah SMK biasanya memilki hubungan atau koneksi dengan industri – industri seperti Industri Toyota, Yamaha, PT, dan lain sebagainya. Dimana nantinya dari industri – industri tersebut akan didatangkan guru tamu, untuk memperdalam skill atau keahlian dari para siswa/i.

Sedangkan Perencanaan dalam mata pelajaran seluruh jurusan ditetapkan secara bersama, dengan ada ketua dan sekretaris,dimana ini akan menjadi pengarah atau pengkoordinir suatu kegiatan musyawarah agar nantinya muncul hasil kesepakatan bersama sesuai dengan kebutuhan warga sekolah pada saat itu. SMK Negeri 1 Percut Sei Tuan telah lama membuat program unit produksi di setiap jurusan untuk memenuhi atau melayani dari masyarakat sekitar maupun bekerja sama dengan pihak industri.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Khoiruddin Yusuf. MT. (2022). Upaya Guru Dan Orang Tua Dalam Menanamkan Karakter Religius Di Masa Pembelajaran Daring Bagi Siswa Dari Keluarga Nelayan (Studi Kasus Di Smk Islam Nurul Iman Kabupaten Lampung Timur). *Skripsi*, 33(1).
- Hayati, R. K., & Utomo, A. C. (2022). Penanaman Karakter Gotong Royong dan Tanggung Jawab melalui Metode Pembiasaan di Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, 6(4). <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i4.3248>.

- Kholifah. (2018). Prosiding Seminar Nasional : Memaksimalkan Peran Pendidik dalam Membangun Karakter Anak Usia Dini Sebagai Wujud Investasi Bangsa. In *Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Pogolawe Tuban*.
- M. D. P. R., Suhaeb, F. W., & Idrus, I. I. (2022). Permasalahan Pendidikan Anak Nelayan Miskin Di Kampung Nelayan Untia Kota Makassar. *Predestinasi*, 15(1).
- Nurjanah, A., Maulana, H., & Nurhayati, N. (2023). Psikologi Pendidikan dan Manfaat bagi Pembelajaran: Tinjauan Literatur. *Cendekia Inovatif Dan Berbudaya*, 1(1).
- Rahman, A., Munandar, S. A., Fitriani, A., Karlina, Y., & Yumriani. (2022). Pengertian Pendidikan, Ilmu Pendidikan dan Unsur-Unsur Pendidikan. *Al Urwatul Wutsqa: Kajian Pendidikan Islam*, 2(1).
- Rihlah, J., Kamilah, U., & Shari, D. (2020). Gambaran Pendidikan Karakter Anak Usia Dini di Masa Pandemi covid-19. *PAUD Lectura: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 4(01).
- Ruslan, R. (2017). Manajemen Public Relations & Media Komunikasi. In *Manajemen Public Relations & Media Komunikasi*.
- Slameto. (2012). Belajar Dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhinya. Jakarta: Rineke Cipta. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9).
- Suci, S. Z., Humaizi, H., Zulkifli, Z., Saladin, T. I., & Manurung, R. (2023). Pola Pengasuhan dan Pendidikan Karakter Anak pada Keluarga Nelayan di Indonesia. *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 7(1).
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D. Bandung: Alfabeta. *Bandung: Alfabeta*.
- UU RI no.20 tahun 2003. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. *Undang-Undang Republik Indonesia*, 8.